

Nama : Riani Suniar

NPM : 2213031042

KELAS: B

Case Study Pertemuan 9

1. Jika kita melihat kegagalan kebijakan Making Indonesia 4.0 dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas, kita dapat mengidentifikasi beberapa faktor utama. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesiapan industri untuk mengadopsi teknologi Industri 4.0 secara menyeluruh, termasuk kurangnya investasi yang memadai untuk teknologi digital dan otomatisasi. Selain itu, program yang direncanakan lebih banyak bersifat pilot tanpa skala nasional yang besar karena tidak ada koordinasi yang baik antara sektor pemerintah dan industri swasta. Proses transformasi industri juga dihambat oleh kendala seperti infrastruktur digital yang tidak merata dan sumber daya manusia yang belum siap secara digital dan teknis. Dengan demikian, implementasi kebijakan menjadi lebih buruk dan industri prioritas seperti makanan dan minuman, tekstil, mobil, elektronik, dan kimia terus berkembang dengan lambat.

2. Strategi dan pelaksanaan memiliki perbedaan yang mencolok jika dibandingkan dengan strategi kebijakan industri negara seperti Vietnam dan Korea Selatan. Dengan insentif kuat bagi investasi asing dan penempatan kawasan industri terintegrasi yang menarik bagi pelaku industri global, Vietnam cenderung mengadopsi strategi investasi terbuka dan agresif, sedangkan Korea Selatan lebih berfokus pada perencanaan jangka panjang, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi, sehingga kebijakan industri mereka lebih terarah dan adaptif terhadap dinamika teknologi.

3. Untuk menyelamatkan Indonesia dari jebakan deindustrialisasi dini, diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan akselerasi transformasi digital dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem inovasi. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi antara kementerian dan melibatkan pihak swasta dengan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk investasi dalam industri 4.0. Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi digital berbasis industri juga harus diprioritaskan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap untuk mengelola teknologi baru. Selain itu, wilayah industri strategis harus diperhatikan saat membangun infrastruktur digital nasional. Selain itu, kebijakan kawasan industri harus direvitalisasi dengan mengutamakan integrasi digital dan kolaborasi inovasi lintas sektor. Regulasi yang mendorong investasi berkelanjutan dan memudahkan perizinan harus ditetapkan. Pada akhirnya, kebijakan industri yang efektif memerlukan data dan evaluasi berkelanjutan agar dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar global.